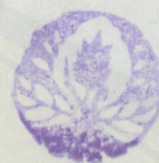


**PERBANDINGAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL
DAERAH PERTANIAN DENGAN DAERAH INDUSTRI
DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2001**

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Asal :
Tempa :
No Induk :
: Hadiah
Pembelian
: Tgl. 06 NOV 2003
fat

2
Klass
338-9
IMA
p
C.1

Oleh :

WAHYU INDRA IMAWAN

NIM. 980810101105

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2003**

JUDUL SKRIPSI

PERBANDINGAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL
DAERAH PERTANIAN DENGAN DAERAH INDUSTRI DI WILAYAH PROPINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2001

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : WAHYU INDRA IMAWAN

N. I. M. : 980810101105

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

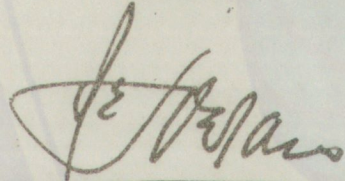
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

27 SEPTEMBER 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

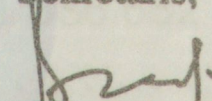
Ketua,



Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130 355 409

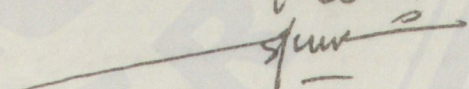
Sekretaris,



Drs. Rafael Purtono S., MS

NIP. 131 793 384

Anggota,



Drs. Badjuri, ME

NIP. 131 386 652

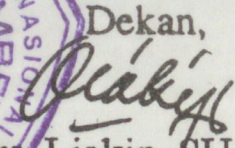


Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. Liakip, SU

NIP. 130 531 976



HALAMAN MOTO

Adakah di Hati Anda Cinta Kepada Allah SWT dan Rosul-Nya

(KH. Abd. Warist. A)

Cinta sejati lahir dari hati nurani,

Cinta yang murni lahir dari lubuk hati,

Cinta yang suci datang dari Illahi,

Cinta abadi cinta kita berdua

(i'm why'02)

Berinfaklah kamu baik dalam keadaan suka maupun duka dengan hartamu, ilmumu, tenagamu dengan ikhlas, maka rahmat Allah akan selalu dekat denganmu.

(Iwan '03)

"Janganlah kamu mengandalkan hartamu, kecerdikanmu, kepandaianmu, amalanmu, kekuatanmu, kedudukanmu, sebaik-baiknya yang kamu miliki tidak akan ada artinya tanpa rahmat dan pertolongan dari Allah SWT."

"Cintaku hanya untuk Allah SWT dan Rasul-NYA tak akan pernah mati walaupun telah pingsan berkali-kali".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Sederhana ini aku persembahkan untuk :

Allah SWT, Rasul & Nabi-Ku (Muhammad SAW)

*Orang tua yang tulus membimbingku dan selalu menyayangiku sehingga aku
dapat mengarungi kehidupan di dunia dalam menggapai ridho Ilahi.*

*Rumah yang damai, do'a dan restumu merupakan kunci sukses
yang tak terbalas sepanjang usia.*

*Tempatku menelanjangi segala masalah hakekat hidup
ini.*

Rose en Simir yang menjadikan hidup ini lebih bergairah.

*SP-GL'98 : yang telah tega meninggalkan aku, nggak apa-apa
yang penting telat.*

ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi daerah di Indonesia saat ini sedang memasuki proses transisi menuju perubahan dari manajemen pembangunan yang sentralistik dan terpusat, menuju proses pembangunan yang terdesentralisasikan. Hal ini ditandai dengan disahkan UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU. No. 25 tahun 1999. Otonomi Daerah diharapkan akan membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan penguatan potensi ekonomi lokal dan regional ini pada akhirnya akan menjadi kutub-kutub pertumbuhan (*growth poles*) baru yang pada akhirnya akan menopang kekuatan perekonomian nasional yang lebih baik.

Untuk mengetahui keterkaitan antara Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan basis perekonomian suatu daerah, dalam hal ini, bila DDF dapat dilihat dari proporsi PAD dan Bantuan Pemerintah (Dana Alokasi) terhadap total penerimaan APBD, maka basis perekonomian suatu daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah yang berbasis ekonomi pertanian dan daerah industri. Penilaian terhadap basis ekonomi dapat dilihat dari proporsi sektoral terhadap PDRB suatu daerah.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dari 37 kabupaten/kota yang ada dalam wilayah administratif propinsi Jawa Timur, 23 kabupaten/kota diantaranya memiliki basis ekonomi pada pertanian, 6 kabupaten/kota berbasis industri, sedangkan 7 yang alin memiliki basis pada sektor perdagangan, hatel dan restoran. Diantara 37 kabupaten/kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Tmur, pada tahun 2001 hanya kota probolinggo yang didominasi oleh sektor angkutan dan komunikasi.

Dilihat dari perbandingan DDF antara daerah yang berbasis ekonomi pertanian dengan daerah yang berbasis ekonomi industri, ternyata daerah pertanian memiliki ketergantungan fiskal yang cukup tinggi dengan rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaannya adalah sebesar 4,56 % sedangkan proporsi Dana Perimbangan rata-ratanya adalah 93,27 %. Untuk daerah yang berbasis ekonomi industri memiliki ketergantungan fiskal lebih baik dengan proporsi rata-rata PAD terhadap total penerimaan sebesar 13,61 %, sedangkan untuk proporsi Dana Perimbangan rata-ratanya adalah 82,87 %. Ini membuktikan bahwa adanya perbedaan Derajat Desentralisasi Fiskal yang signifikan antara kabupaten/kota yang berbasis ekonomi pertanian dengan kabupaten/kota yang berbasis ekonomi industri.

Kata kunci : basis sektoral, Derajat Desentralisasi Fiskal, uji beda daerah pertanian dengan daerah industri.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillah, segala puji adalah milik Allah semata.

Shalawat dan salam terhatur pada junjungan kekasih mulia : Muhammad Rasulullah, para keluarga, sahabat dan semua Rasul, Nabi dan Wali Allah serta ummat beliau hingga akhir zaman nanti.

Setiap karya adalah sumbangan dari banyak pihak, hasil kontribusi dari berbagai kalangan. Skripsi sederhana ini bukanlah termasuk perkecualian. Karena itu, penulis dengan segala ketulusan yang dapat dikumpulkan dalam hati saat ini ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

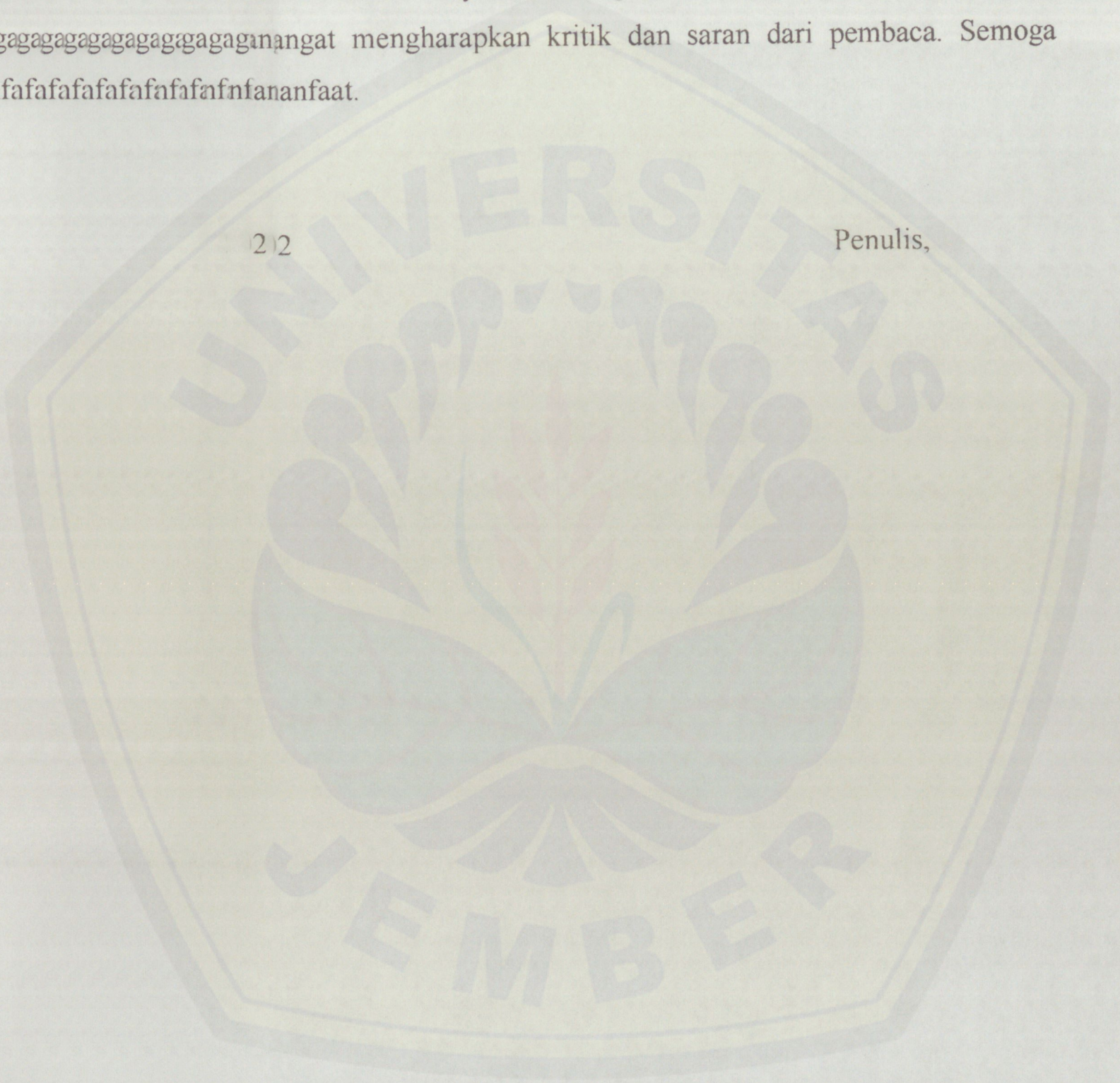
1. Bapak Drs. J. Sugiarto, SU., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Badjuri, ME., selaku pembimbing II, atas bantuan, dorongan dan waktu yang diberikan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Bapak Drs. Liakip, M.Si.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Bapak Dr. Sarwedi, MM. dan Bapak Siswoyo Hari S., SE, M.Si.
4. Ibu Dra. Anifatul Hanim, selaku dosen wali atas bimbingan beliau selama penulis menjalani proses kuliah.
5. Segenap dosen Jurusan IESP FE Universitas Jember.
6. Arek-arek SP-GL '98.
7. Sahabat-sahabat perjalanan hidupku dalam Jama'ah Shalawat PP. Bahrul Ulum.
8. Ade dan sekeluarga atas kesediaannya memberikan tempat bernaung selama pembuatan tulisan ini.
9. Kakak dan adikku Rina dan Rosi, terima kasih untuk segalanya.
10. Penghuni Putra Yudha yang sudah kabur semua, terima kasih telah memberikan goresan memori di masa silam.
11. Nama-nama yang dengan segala permohonan maaf, tak disebutkan.

baik akan selalu bersama kita semua. Semua kedamaian selalu
Semoga kebenaran akan selalu bersama kita semua, dari saat ini
ra mati dan saat hidup setelah mati.
berupaya untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya,
dari masih banyak kekurangan. Demi kesempurnaan karya tulis
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga
manfaat.

002

212

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	8
2.2 Landasan Teori	9
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Metode Pengumpulan Data	21
3.3 Metode Analisis Data	22
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	30
4.2 Analisis Data	35
4.3 Pembahasan	45

DAN NNNNNNNNNNNNNNNMAN SARAN 51

..... 51

..... 52

KA A



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Timur	32
4.2 PDRB Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 atas Dasar Harga Konstan 1993 berdasar Sektor Ekonomi (dalam juta rupiah)	34
4.3 Konfigurasi Propinsi Jawa Timur berdasar sumbangan sektoral terhadap PDRB Kabupaten/Kota tahun 2001	36
4.4 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota yang Berbasis Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 (dalam persen)	38
4.5 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota yang Berbasis Sektor Industri di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 (dalam persen)	39
4.6 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota yang Berbasis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	40
4.7 Derajat Desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota yang Berbasis Sektor Angkutan dan Komunikasi di Propinsi Jawa Timur	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
4.1	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur	33
4.2	Daerah Penerimaan Asumsi Homogenitas Varian Data PAD	42
4.3	Daerah Penerimaan Asumsi Homogenitas Varian Data Dana Perimbangan ...	43
4.4	Daerah Penerimaan Uji Beda Dua Rata-rata menurut PAD	44
4.5	Daerah Penerimaan Uji Beda Rata-rata menurut Dana Perimbangan	44





BAB I

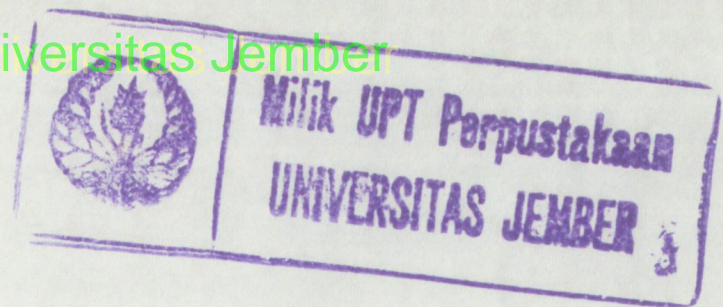
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan upaya demokratisasi di bidang politik, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan mendasar dalam hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat perubahan struktur perekonomian di daerah, melalui proses desentralisasi kewenangan dan manajemen pembangunan. Pembangunan ekonomi daerah di Indonesia saat ini sedang memasuki proses transisi menuju perubahan dari manajemen pembangunan yang sentralistik dan terpusat, menuju proses pembangunan yang terdesentralisasikan. Hal ini terutama ditandai dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai pengganti dari UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1991. Proses desentralisasi ini dicirikan dengan pemberian kewenangan politik ekonomi yang lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing.

Pada pokoknya, fokus desentralisasi yang digariskan oleh dua perundangan ini tidak berubah, yakni bertitik tolak pada Kabupaten dan Kotamadya, dengan pertimbangan : pertama, daerah kabupaten dan kotamadya kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga potensi disintegrasi, separatisme dan federalisme relatif lebih kecil. Kedua, Kabupaten dan kotamadya memiliki cakupan wilayah pelayanan publik yang lebih sempit, sehingga bisa lebih efektif. Hal ini sesuai dengan kaidah *the closer the government the better it services* (makin dekat suatu pemerintah dengan rakyatnya, makin baiklah pelayanannya). Ketiga, kabupaten/kotamadya merupakan ujung tombak implementasi lapangan dalam pembangunan, sehingga mereka lebih tahu dan mengenal potensi dan peluang yang dihadapi. Hal ini juga terkait dengan akuntabilitas publik yang lebih mudah, karena menyangkut masyarakat dalam jumlah yang lebih kecil. (Kuncoro, 1996 : 406 dan Rasyid, 1998 : 100).

Dari sisi ekonomis, otonomi daerah diharapkan akan membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk lebih mengembangkan perekonomian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa studi dan penelitian berkaitan dengan derajat desentralisasi fiskal daerah telah pernah dilakukan. Di antara studi tersebut ada yang mengkhususkan pada daerah atau wilayah tertentu dan ada pula studi yang berusaha untuk mengkaji desentralisasi fiskal dari sudut perekonomian nasional.

Kusumadewi (2001) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Pemerintah di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah, mencoba untuk meneliti derajat desentralisasi fiskal di Wilayah Pembangunan I Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis rasio PAD-Total Penerimaan, rasio Bantuan Pemerintah (G)-Total Penerimaan dan rasio Pajak Daerah (P)-Total Penerimaan dan juga analisis regresi untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan bantuan pemerintah terhadap derajat desentralisasi fiskal untuk periode antara 1993 sampai dengan 1999.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah-daerah di WP I terhadap Pemerintah relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya rata-rata PAD/Y selama 1993-1999 yaitu 12,80 sampai 33,40 persen, dan tingginya rata-rata G/Y yaitu 42,17 sampai 71,32 persen. Kabupaten Demak mempunyai tingkat ketergantungan yang paling tinggi dengan PAD 12,80 persen dan Bantuan 71,32 persen, sedangkan Kota Semarang mempunyai tingkat ketergantungan yang paling rendah dengan PAD 33,40 persen dan Bantuan 42,17 persen. Untuk variabel Pajak Daerah, pengaruhnya relatif bersifat positif, yaitu cenderung menaikkan penerimaan Daerah.

Berdasar hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Daerah-daerah di WP I belum siap melaksanakan otonomi daerah, karena masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah. Oleh karena itu Daerah-daerah perlu menggali sumber-sumber penerimaan terutama pajak daerah secara maksimal, sehingga akan meningkatkan PAD yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluarannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembangunan Wilayah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah masyarakat dan bangsa. Pemahaman ini mengandung sebuah implikasi bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor pertambahan jumlah barang dan jasa seperti yang terlihat dalam paradigma pertumbuhan, namun juga mencakup pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui distribusi penghasilan (*income distribution*) dan pemerataan kesempatan.

Dalam kerangka ini, sebuah strategi pembangunan yang dikembangkan harus memiliki dasar pijak kewilayahan (*regional*) yang kuat. Strategi pembangunan wilayah yang digunakan harus mampu meningkatkan kemampuan wilayah untuk berkembang secara mandiri dan otonom. Hal ini menghasilkan beberapa keuntungan. *Pertama*, terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mempercepat laju pertumbuhan secara nasional. *Kedua*, penguatan struktur perekonomian nasional karena memiliki persebaran pusat pertumbuhan yang akan mengurangi resiko yang disebabkan oleh sentralisme kekuatan ekonomi. *Ketiga*, memenuhi rasa keadilan dengan adanya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dengan daerah. *Keempat*, peningkatan efektifitas kebijaksanaan ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat regional. Semua ini memerlukan adanya kebijakan pembangunan kewilayahan yang tepat.

Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan nasional di negara sedang berkembang adalah kuatnya paradigma sentralistik dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan juga penguasaan aset-aset ekonomi. Hal ini akan menyebabkan timbulnya *backwash effect* (efek pencucian) di mana daerah yang lebih maju akan menguras sumberdaya yang tersedia di daerah yang kurang maju. Gunnar Myrdal (dalam Sukirno, 1985) menyebut fenomena ini sebagai kausasi kumulatif, yang akan memperbesar kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin.

Untuk mencegah hal tersebut, pembangunan wilayah harus didasarkan atas perencanaan wilayah yang baik dan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar semata tak akan dapat menyelesaikan distribusi dan

pemerataan kesempatan dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Mekanisme pasar juga gagal untuk mengatur penanganan masalah eksternalitas yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Hal inilah yang menuntut peran pemerintah daerah secara lebih signifikan dalam perencanaan dan pembangunan wilayah.

2.2.2 Teori Basis Ekonomi

2.2.2.1 Perencanaan Sektoral

Dalam ilmu ekonomi, terdapat asumsi keterbatasan sumberdaya yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi. Asumsi ini mengharuskan setiap daerah untuk menetapkan dan memilih prioritas-prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan. Prioritas-prioritas tersebut mencakup pula prioritas sektoral yang dipilih berdasarkan kemampuan sektor ekonomi untuk menjadi lokomotif yang akan menggerakkan perekonomian. Hal inilah yang menegaskan perlunya perencanaan sektoral dalam perekonomian.

Dasar teori perencanaan sektoral adalah strategi pembangunan tidak seimbang (*unbalanced development*) yang dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka pembangunan, tidak seimbang lebih cocok untuk diterapkan di negara sedang berkembang, dikarenakan beberapa hal (dalam Sukirno, 1985 : 322) :

1. Secara historis, pola pembangunan ekonomi coraknya tidak seimbang;
2. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, harus ada prioritas dalam alokasinya;
3. Pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bottleneck*) dalam proses pembangunan, tetapi akan menjadi pendorong dalam pembangunan selanjutnya.

Hirschman berpendapat bahwa perekonomian berada dalam sebuah struktur interdependensi (saling ketergantungan). Hal ini berarti pembangunan satu sektor ekonomi akan mempengaruhi sektor ekonomi yang lain melalui apa yang disebut Hirschman sebagai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Tugas pemerintah dalam perencanaan sektoral adalah

diterangkan oleh Chase-Dunn (Blair J, 1991), bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif itu merupakan :

1. Akibat investasi asing, sumber-sumber alam di negara pinggiran jadi habis. Laba dari investasi diangkut ke luar negeri, maka negara-negara pinggiran kehilangan sumber bagi pembangunannya.
2. Akibat produksi yang berorientasi ke luar negeri dan masuknya perusahaan-perusahaan multinasional, mengubah struktur ekonomi negara pinggiran, yaitu terciptanya borjuasi lokal yang bekerjasama dan melayani kepentingan modal asing.
3. Hubungan antar elit di negara investor dengan negara pinggiran mencegah terjadinya pembangunan pada sektor tertentu kalau itu dianggap akan merugikan kepentingan mereka.

Pada level domestik (negara pinggiran/berkembang), akan menerapkan pembangunan yang berorientasi ke luar negeri, yaitu industri manufaktur yang berhubungan dengan kepentingan investor. Struktur ini mendorong kondisi agar upah buruh rendah, namun masih berada diatas kebutuhan hidup mereka. Implikasinya adalah bagaimana harga pangan ditekan serendah mungkin. Selanjutnya secara integral dibuatlah kebijakan pertanian yang memungkinkan untuk terciptanya stabilitas harga pangan. Kebijakan ini dilihat dari sektor pembangunan merugikan sektor pertanian, dan dilihat dari pelaku ekonomi tentu saja merugikan para petani. Proses inilah yang menyebabkan suatu kemiskinan struktural.

2.2.2.3 Kontribusi Nilai Tambah Sektor

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang mencakup baik perubahan kuantitatif seperti peningkatan pendapatan nasional maupun perubahan kualitatif seperti perubahan dalam struktur ekonomi, kelembagaan dan lain-lain.

Chenery (dalam M. Todaro, 1994) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai seperangkat perubahan yang saling berkaitan di dalam struktur suatu perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus menerus.

Ada 2 macam PDRB, yaitu :

a. PDRB atas dasar harga berlaku

Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tiap tahun (harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan). Digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi.

b. PDRB atas dasar harga konstan

Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Sedangkan PDRB per kapita adalah PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

2.2.3 Teori Derajat Desentralisasi Fiskal

2.2.3.1 Dasar Desentralisasi

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara dunia ketiga.

Ada berbagai pengertian desentralisasi. Leemans (1970) misalnya, membedakan dua macam desentralisasi : representative local government and field administration. R. Maddick (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai proses

dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah; sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kota pusat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah pada umumnya dianggap sebagai manifestasi struktural dari desentralisasi (*political decentralization*). Sementara itu, administrasi lapangan (*field administration*) atau desentralisasi administratif adalah kata lain dari dekonsentrasi

Pemerintah pusat dapat memilih apakah akan menekankan pada pemerintah daerah (Pemda) ataukah pada administrasi lapangan. Pilihan tergantung pada apakah administrasi lapangan dapat seefektif Pemda dalam mengurangi tekanan dari pusat dan mengembangkan periphery. Di pihak lain, dapatkah Pemda melayani kebutuhan masyarakat seefisien mungkin dibandingkan dengan agen/kantor pemerintah pusat di daerah. Perbedaannya akan terletak terutama pada kemampuan untuk memahami kebutuhan dan masalah daerah, serta tingkat tanggungjawab yang diembannya.

Di Indonesia, dekonsentrasi dan desentralisasi agaknya merupakan klasifikasi sistem administrasi pemerintah daerah yang lebih populer digunakan. Ini tercermin dari pasal 18 UUD 1945 beserta serangkaian undang-undang yang mengatur implementasinya.

2.2.3.2 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di sini di bagi menjadi dua yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan alokasi sumber-sumber dalam bentuk uang sementara perencanaan fisik berkenaan dengan alokasi sumber dipandang dari segi manusia, bahan dan peralatan.

Perencanaan keuangan merupakan kunci pokok perencanaan ekonomi. Jika keuangan tersedia secara memadai, sasaran fisik gampang tercapai. Tetapi bila sumber keuangan kurang memadai/tidak ada, jangan harap rencana dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu, perencanaan keuangan penting dalam rangka menghapuskan kepincangan antara penawaran dan permintaan dan untuk menghitung biaya dan hasil berbagi proyek. Umpama, O. Lange (1961) (dalam

Second Five Year Plan : 16) menunjukkan bahwa hakekat perencanaan keuangan adalah untuk memastikan apakah permintaan dan penawaran bertemu dalam suatu cara yang memanfaatkan kemampuan fisik sepenuh mungkin tanpa perubahan besar dan tak terduga pada struktur harga. Sedangkan perencanaan fisik adalah suatu usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan dalam arti alokasi faktor dan hasil produk sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan.

2.2.3.3 Ketergantungan Fiskal Daerah

Menurut Kuncoro (1995 : 408) ada dua indikator utama ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, yaitu :

1. Rendahnya PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator nyata kemampuan keuangan daerah untuk membiayai dirinya sendiri. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih perusahaan daerah (BUMD) dan lain-lain penerimaan. Dalam hal ini, makin besar rasio PAD terhadap total penerimaan, makin rendah ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat.

2. Dominannya transfer dari Pusat

Proporsi subsidi atau transfer dari pusat merupakan indikator ketergantungan yang lain. Dalam era otonomi daerah, subsidi pusat kemudian diganti dengan dana perimbangan yang besarnya diatur menurut Undang-undang. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin rendah rasio dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah, makin rendah pula ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat.

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka bantuan dari pemerintah pusat (grant) dalam hal ini Dana Perimbangan sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu/mendorong peningkatan PAD tersebut, dan bukan sebaliknya. Hal ini antara lain ditekankan oleh Nurjaman Arsyad (1990) bahwa hakekat bantuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah.

pada tahun 1945, dan terus mengalami perkembangan dan perubahan (Adisubrata, 1999 : 1).

Di masa Orde Baru, otonomi daerah diatur dengan UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang lebih menekankan aspek dekonsentrasi daripada desentralisasi karena adanya tugas perbantuan (*medebewind*) yang berarti pengkoordinasian otonomi daerah oleh kepala daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Akibatnya, dalam praktek yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan melalui kontrol dari pusat terhadap daerah. Kontrol ini terlihat jelas dalam aspek keuangan di mana Pemerintah Daerah kehilangan keleluasaan bertindak dan mengambil kebijakan (*local discretion*) (Kuncoro, 1997 : 406).

Hal inilah yang berusaha dikoreksi oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menekankan adanya desentralisasi untuk Kabupaten dan Kotamadya serta dekonsentrasi untuk propinsi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1)

2.2.3.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pada dasarnya APBD terdiri dari dua bagian yaitu bagian pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Laba BUMD

- d. Penerimaan dari Dinas-dinas
 - e. Penerimaan lain-lain
3. Bagian Dana Perimbangan
- a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Pinjaman Pemerintah Daerah

Sedangkan Pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja Rutin merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai operasional penyelenggaraan roda pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat. Belanja Rutin terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Biaya Pemeliharaan
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Lain-lain
- Angsuran Hutang dan Bunga
- Ganjaran/Subsidi/Sumbangan
- Pensiun
- Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain
- Pengeluaran Tidak Tersangka

Dalam kondisi keterbatasan pendapatan Daerah perlu diupayakan adanya penghematan Belanja Rutin secara sungguh-sungguh, kecuali komponen dana Belanja Pegawai. Penghematan Belanja Non-Pegawai dilakukan melalui rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran untuk pemenuhan kebutuhan riil, dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Belanja Pembangunan merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan sektor-sektor yang mendukung

pembangunan. Dalam penyusunan anggaran Belanja Pembangunan Daerah hendaknya disesuaikan dengan arah dan kebijakan fiskal dengan misi utama memberikan perlindungan dan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat. Belanja Pembangunan meliputi beberapa sektor, yaitu (Kusumadewi, 2001:19) :

- Industri
- Pertanian dan Kehutanan
- Sumber Daya Air dan Irigasi
- Tenaga Kerja
- Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi
- Transportasi
- Pertambangan dan Energi
- Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah
- Pembangunan Daerah dan Pemukiman
- Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga
- Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja
- Perumahan dan Pemukiman
- Agama
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Hukum
- Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
- Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
- Keamanan dan Ketertiban Umum
- Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mengetahui, membandingkan dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kotamadya yang memiliki basis ekonomi pertanian dan kabupaten/kotamadya yang memiliki basis ekonomi industri, di wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001. Penelitian ini bersifat *ex post facto*, artinya bahwa data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung untuk menganalisis karakteristik data yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa letak propinsi Jawa Timur strategis dan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

3.1.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah atau telah diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Dajan, 1986:11). Data ini diperoleh dari berbagai sumber yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, seperti BPS Propinsi Jawa Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kotamadya se-Propinsi Jawa Timur Tahun 2001.
2. Data APBD kabupaten/kotamadya se-Propinsi Jawa Timur Tahun 2001.

Metode pengumpulan data yang digunakan dikaitkan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis tingkat ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah adalah dengan menggunakan data pada tahun 2001. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah data jadi yang tersedia dalam bentuk arsip (data sekunder), dan dengan studi pustaka (*librarian studies*), yaitu mengadakan survei

Keterangan :

P = Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB

I = Persentase kontribusi sektor industri terhadap total PDRB

X_p = Sektor pertanian

X_i = Sektor industri

Y = Total PDRB

Kriteria yang dipakai :

$P > I$, berarti sektor pertanian lebih dominan dibandingkan sektor industri karena sektor pertanian memiliki sumbangan PDRB yang lebih besar daripada sektor industri terhadap PDRB Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan maka Kabupaten/Kotamadya tersebut basis perekonomiannya sektor pertanian (daerah pertanian),

$P < I$, berarti sektor industri lebih dominan dibandingkan sektor pertanian karena sektor industri memiliki sumbangan PDRB yang lebih besar daripada sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan maka Kabupaten/Kotamadya tersebut basis perekonomiannya sektor industri (daerah industri).

$P = I$, berarti daerah tersebut didominasi sektor pertanian dan sektor industri yang sama besarnya, maka daerah tersebut akan digolongkan sebagai daerah pertanian dan industri (daerah berimbang).

3.3.2 Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut di atas, maka metode analisa data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah.

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah dapat dicari dengan menggunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, rasio bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan dan rasio pajak daerah terhadap total penerimaan (Radianto, 1997: 47). Pasca otonomi daerah, istilah

bantuan pemerintah diganti dengan dana perimbangan, karena itu, dalam penelitian ini, hanya akan digunakan dua indikator yaitu rasio PAD terhadap total penerimaan daerah dan rasio bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam hal ini diambil dari sisi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan APBD}} \times 100\% \quad (1)$$

$$G = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan APBD}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

G = Dana Perimbangan

Dari hasil perhitungan tersebut, semakin besar rasio PAD dan semakin kecil rasio dana perimbangan, maka ketergantungan Daerah terhadap Pusat semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil rasio PAD dan semakin besar rasio dana perimbangan, maka ketergantungan Daerah terhadap Pusat semakin besar.

3.3.3 Analisis Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal Antara Daerah Pertanian Dengan Daerah Industri

3.3.3.1 Uji Normalitas Data

Uji kenormalan data dilakukan dengan menggunakan Uji Lilliefors. Prosedur untuk mengadakan uji normalitas data dengan uji Lilliefors ini adalah sebagai berikut (Sudjana, 1996 : 466) :

dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Uji F ini dirumuskan sebagai berikut (Sudjana, 1996 : 304) :

$$F = \frac{\sum_{i=1}^k \{n_i(Y_i - Y)^2 / (k-1)\}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} (Y_{ij} - Y_i)^2 / \sum_{i=1}^k (n_i - 1)}$$

Keterangan :

Y_{ij} = data ke j untuk sampel ke i

$\bar{Y}_i = \sum_{j=1}^{n_j} Y_{ij} / n_i$ = rata-rata untuk sampel ke-i

$Y = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} Y_{ij} / \sum_{i=1}^k n_i$ = rata-rata untuk semua data

Rumusan Hipotesis

1. H_0 : berarti varian data tersebut homogen.
2. H_i : berarti varian data tersebut heterogen (tidak homogen).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ [α 0,05, dk pembilang (k-1) dan dk penyebut (n_i-1)] berarti hipotesis nol (H_0) diterima dan varian data homogen (*equal variances*)
2. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ [α 0,05, dk pembilang (k-1) dan dk penyebut (n_i-1)] berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan varian data tidak homogen

3.3.3.3 Uji Beda Dua Rata-rata

Untuk menguji adanya perbedaan yang cukup berarti tentang ketergantungan fiskal antara daerah yang sektor basis perekonomiannya pertanian dengan daerah yang sektor basis perekonomiannya industri maka digunakan uji t dengan rumus (Dajan, 1988:258) :

3.3.3.3 Uji Beda Dua Rata-rata

Untuk menguji adanya perbedaan yang cukup berarti tentang ketergantungan fiskal antara daerah yang sektor basis perekonomiannya pertanian dengan daerah yang sektor basis perekonomiannya industri maka digunakan uji t dengan rumus (Dajan, 1988:258) :

$$T_{test} = \frac{(X_1 - X_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

dengan asumsi : $\mu_1 = \mu_2$

Standart deviasi dapat diperoleh dengan (Dajan, 1986 : 179)

$$S_1 = \sqrt{\frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^n (X_1 - \bar{X})^2}$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^n (X_2 - \bar{X})^2}$$

Keterangan :

- X_1 = rata-rata derajat desentralisasi fiskal daerah pertanian dalam (%).
- X_2 = rata-rata derajat desentralisasi fiskal daerah industri dalam (%).
- n_1 = jumlah daerah yang memiliki basis sektoral perekonomian pertanian.
- n_2 = jumlah daerah yang memiliki basis sektoral perekonomian industri.
- S_1 = standard deviasi derajat desentralisasi fiskal daerah pertanian.
- S_2 = standart deviasi derajat desentralisasi fiskal daerah industri.

Rumusan hipotesis :

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Bila $t_{est} > t_{tabel}$ ($\alpha 0,05 / 2 ; n_1 + n_2 - 2$) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak berarti ada beda nyata antara rasio ketergantungan fiskal daerah pertanian dengan daerah industri.
2. Bila $t_{est} < t_{tabel}$ ($\alpha 0,05 / 2 ; n_1 + n_2 - 2$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti tidak ada beda nyata antara rasio ketergantungan fiskal daerah pertanian dengan daerah industri.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan pengukurannya

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, penerimaan dari Dinas-dinas dan Penerimaan Lain-lain dalam [rupiah/tahun].

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kriteria daerah tersebut. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) [rupiah/tahun].

3. Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah yang dimaksud di sini adalah kemampuan Daerah dalam meningkatkan PAD. Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal Daerah digunakan rasio antara PAD dengan Total Penerimaan APBD dalam [persen (%)].

4. Variabel Dana Perimbangan

Bantuan dari Pemerintah Pusat diukur melalui besarnya bantuan terhadap Total Penerimaan APBD dalam [persen (%)].

5. Total Penerimaan APBD

Total penerimaan daerah dalam hal ini adalah Total Penerimaan Kabupaten/Kotamadya di wilayah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2001. Total Penerimaan Daerah merupakan jumlah seluruh penerimaan daerah yang terdiri



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Umum Propinsi Jawa Timur

Propinsi Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa, dengan luas wilayah daratan 47.130,15 km². Wilayah daratan ini terbagi atas kawasan hutan 12.261,64 km² (26,02%), persawahan seluas 12.286,71 km² (26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11.449,15 km² (24,29%), pemukiman/kampung seluas 5.712,15 km² (12,12%), perkebunan seluas 1.581,94 km² (3,36%), tanah tandus/rusak seluas 1.293,78 km² (2,75%), tambak/kolam mencapai 737,71 km² (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km² (1,29%) dan selebihnya untuk rawa/danau, padang rumput dan lain-lain seluas 1.201,42 km² (2,55%). Dengan kelembaban minimum 39% dan maksimum 98%, Jawa Timur memiliki potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian (Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2000 : 5)

Propinsi Jawa Timur yang secara administrasi terbagi atas 29 Kabupaten dan 8 Kota dengan kondisi alam dan budaya berbeda satu sama lain. Perbedaan kondisi alam ini menyebabkan potensi sumber daya alam juga berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya dan diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu menggali potensi daerahnya untuk berkompetisi secara sehat dengan daerah lain dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah laba usaha milik daerah dan laba usaha daerah yang sah lainnya.

4.1.2 Kondisi Penduduk

Berdasarkan hasil sementara sensus penduduk pada tahun 2000 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 34.525.588 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki

Dari hasil Sakernas 1998, tercatat jumlah angkatan kerja sebesar 17.554.000 orang dan 95,90% dari mereka melakukan aktivitas kerja, sedangkan sisanya 4, 10% masih dalam rangka mencari pekerjaan. Komposisi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 96,69% bekerja dan 3,31% mencari pekerjaan (Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur 2001-2005 :66)

4.1.4. Penerimaan Daerah

Secara absolut total realisasi penerimaan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota meningkat menjadi 10.534,81 milyar rupiah dari 4.126,30 milyar rupiah pada tahun 2000, atau naik sebesar 155,31 %.

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Timur

Rincian	2000 (Milyar Rp)	2001 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
PENERIMAAN DAERAH	4.126,30	10.534,81	155,31
1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	166,46	265,37	59,42
2. Pendapatan Asli Daerah	451,48	825,85	82,92
- Pajak Daerah	197,16	342,39	73,66
- Retribusi Daerah	186,69	295,15	58,09
- Bagian Laba Usaha Milik Daerah	15,84	17,80	12,37
- Pendapatan Lainnya	51,91	170,51	228,48
3. Dana Perimbangan	3.457,52	9.437,04	172,94
- Bagi Hasil Pajak	445,60	771,99	73,25
- Bagi Hasil Bukan Pajak	5,84	97,43	1.567,19
- Dana Alokasi Umum (DAU)	2.994,54	8.539,15	179,15
- Dana Alokasi Khusus(DAK)	--	36,37	--
- Penerimaan Lainnya	7,88	172,09	2.083,69
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	50,73	6,56	-87,06
- Pinjaman Dalam Negeri	50,73	6,56	-87,06
- Pinjaman Luar Negeri	--	--	--

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur (2002)

turun menjadi 41,46%. Sedangkan Retribusi Daerah pada tahun 2000 memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 41,34% dan pada tahun 2001 turun menjadi 35,74%. Keterangan diatas dapat dilihat dalam grafik pendapatan asli daerah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur (grafik 4.1)

4.1.6. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto tahun 2001 untuk wilayah Propinsi Jawa Timur secara nominal masih didominasi oleh sumbangan sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah (*value added*) yang diberikan oleh sektor industri pengolahan adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Jumlah total PDRB propinsi Jawa Timur untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp. 56.865.978,78, dengan sumbangan terbesar berasal dari sektor industri dan pengolahan sebesar 15.538.227,58 (26,44 %) disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran ditempat kedua dengan sumbangan sebesar 12.837.567,17 (21,85%). Sektor pertanian menempati urutan ketiga dengan menyumbang Rp. 10.371.281,25 (17,65%) dari total PDRB tahun 2001.

Tabel 4.2 PDRB Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 atas Dasar Harga Konstan 1993 berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam juta rupiah)

No	Sektor	Jumlah	%
1	Pertanian	10.371.281,25	17,65
2	Pertambangan dan Penggalian	1.136.382,00	1,93
3	Industri Pengolahan	15.538.227,58	26,44
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.594.202,09	2,71
5	Konstruksi	2.608.371,36	4,44
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.837.567,17	21,85
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.793.517,96	8,16
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.378.586,37	5,75
9	Jasa-jasa	6.501.293,80	11,06
	Total	58.759.429,58	100

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur (2002)

upaya industrialisasi sektor pertanian melalui agroindustri termasuk salah satu usaha yang sering dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah berbasis ekonomi pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun proporsi sumbangan sektor industri pengolahan menyumbangkan jumlah terbesar terhadap PDRB propinsi Jawa Timur, namun sektor ini hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di daerah- daerah yang terkenal sebagai kawasan industri.

Perbedaan yang signifikan ini antara lain disebabkan oleh sumbangan tiga wilayah yang didominasi kawasan industri yang memiliki PDRB jauh di atas wilayah-wilayah lain, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo dan Kota Kediri (lihat lampiran). Sedangkan sektor pertanian walaupun sumbangannya hanya menempati urutan ketiga, namun ia merupakan sektor yang dominan di hampir semua kabupaten/kota di wilayah administratif Propinsi Jawa Timur.

Tabel 4.3 Konfigurasi Propinsi Jawa Timur berdasar sumbangan sektoral terhadap PDRB Kabupaten / Kota Tahun 2001

No.	Sektor Dominan	Kabupaten/Kota
1.	Pertanian	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
2	Industri dan Pengolahan	Tulungagung, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Kota Kediri, Kota Surabaya
3	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Mojokerto, Tuban, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Malang
4	Angkutan dan Komunikasi	Kota Probolinggo

Sumber : diolah dari data BPS Propinsi Jawa Timur (2002)

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah perbedaan derajat desentralisasi fiskal antara kabupaten/kota yang dominan di sektor pertanian sektor pertanian dengan kabupaten/kota yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, sehingga untuk daerah yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan angkutan dan komunikasi tidak akan menjadi bahasan dalam penelitian ini.

4.2.2. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Analisis derajat desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Kriterianya adalah, semakin besar rasio pendapatan asli daerah (PAD) dan semakin kecil rasio dana perimbangan (G), maka ketergantungan Daerah terhadap Pusat semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil rasio pendapatan asli daerah (PAD) dan semakin besar rasio Dana Perimbangan (G), maka ketergantungan daerah terhadap pusat semakin besar.

Sejalan dengan upaya memeperkuat otonomi daerah atau peningkatan PAD, maka dana perimbangan sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu peningkatan PAD tersebut, dan bukan sebaliknya. Hal ini antara lain ditekankan oleh Nurjamam Arsyad (1990) bahwa hakekat bantuan/subsidi (dalam hal ini merupakan dana perimbangan) adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pengertian otonomi fiskal daerah, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Namun demikian harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di propinsi Jawa Timur masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dari masing-masing kabupaten/kota seluruh Jawa Timur yang masih sangat rendah. Artinya bahwa PAD dari masing-masing kabupaten/kota seluruh Jawa Timur belum mampu membiayai pengeluaran rutin. Karena itu otonomi

daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya dan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif.

Tabel 4.4. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten / Kota yang Berbasis Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 (*dalam persen*)

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Lebih	DDF	G	Pinjaman
1	Pacitan	1,59	3,57	94,84	0,00
2	Ponorogo	1,20	5,20	93,60	0,00
3	Trenggalek	3,11	3,85	93,05	0,00
4	Blitar	1,48	3,91	94,61	0,00
5	Kediri	2,41	5,09	92,50	0,00
6	Malang	0,12	5,39	94,49	0,00
7	Lumajang	4,92	5,58	89,50	0,00
8	Jember	1,75	6,19	92,06	0,00
9	Banyuwangi	1,35	5,28	93,38	0,00
10	Bondowoso	1,67	3,46	94,87	0,00
11	Situbondo	2,44	4,86	92,69	0,00
12	Probolinggo	1,52	3,42	95,06	0,00
13	Jombang	1,58	8,31	90,11	0,00
14	Nganjuk	1,90	5,12	92,98	0,00
15	Madiun	0,77	3,05	93,17	3,02
16	Magetan	1,49	4,85	93,66	0,00
17	Ngawi	4,69	3,89	91,42	0,00
18	Bojonegoro	3,31	4,74	91,95	0,00
19	Lamongan	2,12	5,72	92,17	0,00
20	Bangkalan	1,68	3,73	94,59	0,00
21	Sampang	2,71	2,67	94,62	0,00
22	Pamekasan	2,03	3,47	94,51	0,00
23	Sumenep	1,22	3,50	95,28	0,00

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur 2002

Keterangan :

1. DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal suatu daerah
2. G = Dana Perimbangan dari pusat
3. Sisa lebih = sisa lebih anggaran tahun lalu

Untuk daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, derajat desentralisasi fiskal cenderung kecil. Hal ini terlihat dari pangsa PAD terhadap penerimaan daerah yang cenderung kecil, dengan nilai paling rendah di Kabupaten Sampang sebesar 2,67%, dan nilai paling tinggi di Kabupaten Jombang 8,31%. Bila dilihat dari segi pangsa dana perimbangan, proporsi tertinggi adalah di Kabupaten Sumenep sebesar 95,28%, sedangkan yang proporsi dana perimbangannya paling rendah adalah di Kabupaten Lumajang sebesar 89,50 %. Secara rata-rata, proporsi PAD kabupaten/kota yang berbasis pertanian terhadap total penerimaannya adalah sebesar 4,56%, sedangkan untuk proporsi dana perimbangan rata-ratanya adalah 93,27% (data selengkapnya lihat Lampiran 4).

Tabel 4.5. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten / Kota yang Berbasis Sektor Industri Pengolahan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 (*dalam persen*)

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Lebih	DDF	G	Pinjaman
1	Tulungagung	1,15	4,28	94,57	0,00
2	Pasuruan	2,41	9,21	88,39	0,00
3	Sidoarjo	4,79	19,45	75,76	0,00
4	Gresik	5,30	12,34	82,37	0,00
5	Kota Kediri	2,18	8,90	88,86	0,07
6	Kota Surabaya	5,22	27,47	67,31	0,00

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur 2002

Keterangan :

1. DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
2. G = Dana Perimbangan dari pusat
3. Sisa lebih = sisa lebih anggaran tahun lalu

Sedangkan untuk daerah yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, derajat desentralisasi fiskal cenderung lebih besar bila dibanding daerah pertanian. Hal ini terlihat dari pangsa PAD terhadap penerimaan daerah, dengan nilai paling rendah di Kabupaten Tulungagung sebesar 4,28%, dan nilai paling tinggi di Kota Surabaya 27,47%. Bila dilihat dari pangsa dana perimbangan, proporsi tertinggi adalah di Kabupaten Tulungagung sebesar 94,57%, sedangkan yang proporsi dana perimbangannya paling rendah adalah di Kota Surabaya sebesar 67,31 %. Secara rata-rata, proporsi PAD kabupaten/kota yang berbasis industri terhadap total penerimaannya adalah sebesar 13,61%, sedangkan untuk proporsi dana perimbangan rata-ratanya adalah 82,87% (data selengkapnya lihat Lampiran 5).

Untuk daerah yang dominan di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta yang dominan dalam angkutan dan komunikasi, dua tipe daerah ini tidak menjadi fokus dalam penelitian ini, dan datanya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7.

Tabel 4.6. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten / Kota yang Berbasis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Propinsi Jawa Timur 2001 (dalam persen)

No.	Kabupaten / Kota	Sisa Lebih	DDF	G	Pinjaman
1	Mojokerto	1,70	5,08	93,21	0,00
2	Tuban	7,61	10,97	81,42	0,00
3	Kota Blitar	2,42	5,68	91,91	0,00
4	Kota Pasuruan	5,22	27,47	67,31	0,00
5	Kota Malang	3,89	19,08	77,03	0,00
6	Kota Mojokerto	1,23	5,01	93,76	0
7	Kota Madiun	0,46	27,47	67,31	0,00

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur 2002

Keterangan :

1. DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
2. G = Dana Perimbangan dari pusat
3. Sisa lebih = sisa lebih anggaran tahun lalu

maka H_0 diterima dan data dana perimbangan (G), untuk sektor industri pengolahan dinyatakan memiliki distribusi normal (lihat Lampiran 7).

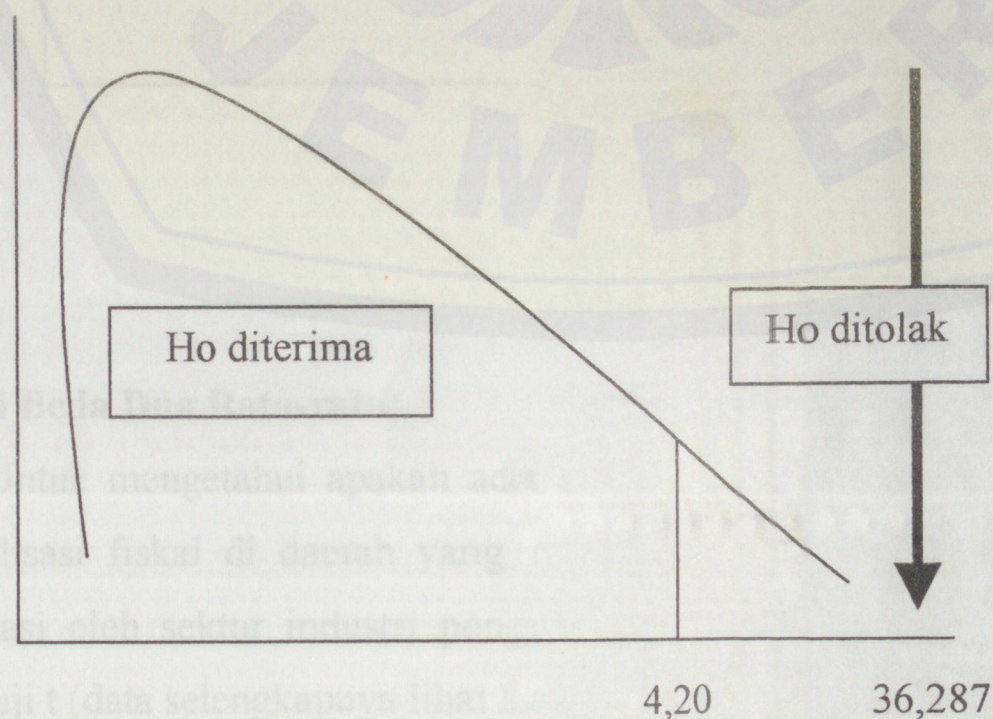
Dari hasil analisis data, baik untuk dana perimbangan (G), maupun untuk Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini semuanya memenuhi asumsi distribusi normal. Dengan demikian, data ini bisa dilakukan analisis lebih lanjut.

kesamaan varians data Dana Perimbangan

4.2.4 Uji Homogenitas Varian

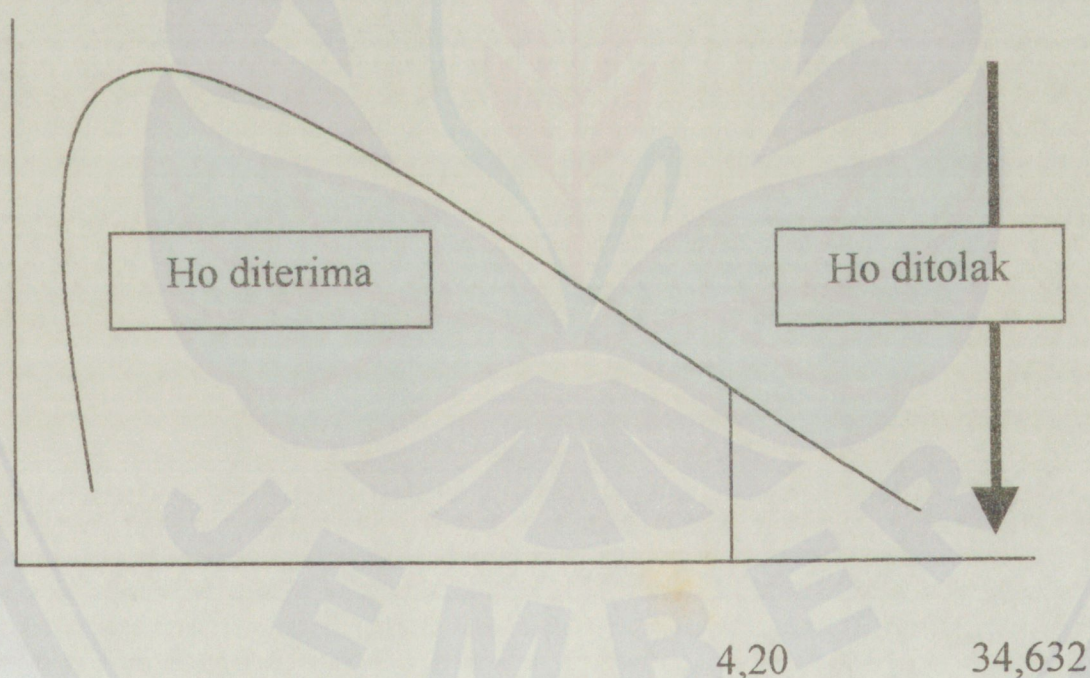
Hasil uji statistik terhadap homogenitas varians untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik untuk daerah yang didominasi sektor pertanian, maupun yang didominasi sektor industri pengolahan, menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 36,287, sedangkan nilai F_{tabel} untuk derajat bebas pembilang $(k-1) = 1$ dan derajat bebas penyebut $(n_i - 1) = 29$ pada taraf nyata 0,05 adalah sebesar 4,20. Ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $36,287 > 4,20$, dan karena itu maka H_0 ditolak, dan asumsi kesamaan varians data Pendapatan Asli Daerah antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan ternyata tidak terpenuhi. Selanjutnya, data yang dipakai adalah data yang tidak mengasumsikan kesamaan varians (*equal variances not assumed*) sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 8.

Grafik 4.2 Daerah penerimaan Asumsi Homogenitas Varian Data PAD



Hasil uji statistik terhadap homogenitas varians untuk data Dana Perimbangan baik untuk daerah yang didominasi sektor pertanian, maupun yang didominasi sektor industri pengolahan, menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 34,632. Sedangkan nilai F_{tabel} untuk derajat bebas pembilang $(k-1) = 1$ dan derajat bebas penyebut $(n_i - 1) = 28$ pada taraf nyata 0.05 adalah sebesar 4,20. Ini berarti bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $34,632 > 4,20$, dan karena itu maka H_0 ditolak, dan asumsi kesamaan varians data Dana Perimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan ternyata tidak terpenuhi. Selanjutnya, sebagaimana pada kasus data PAD, data yang dipakai untuk uji selanjutnya adalah data yang tidak mengasumsikan kesamaan varians (*equal variances not assumed*) sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 8.

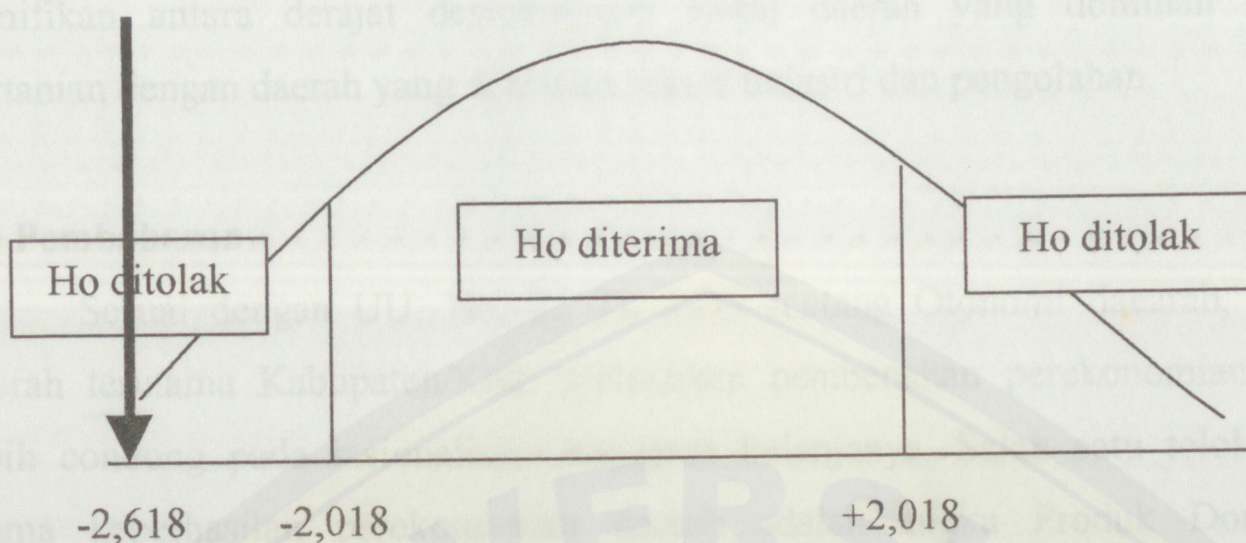
Grafik 4.3 Daerah penerimaan Asumsi Homogenitas Varian Data Dana Perimbangan



4.2.5 Uji Beda Dua Rata-rata

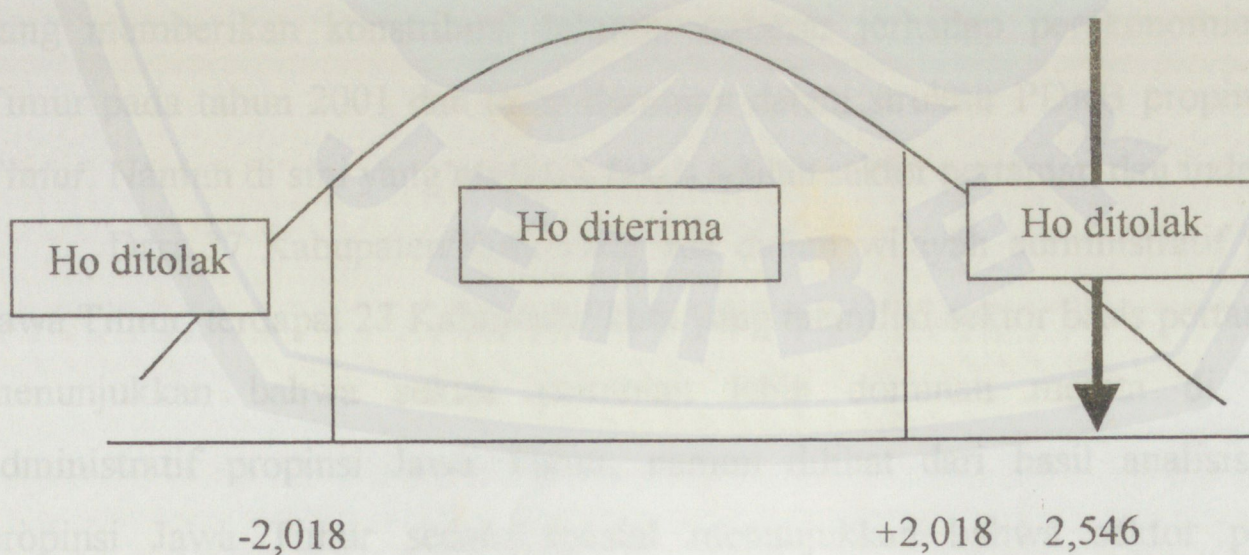
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara derajat desentralisasi fiskal di daerah yang didominasi sektor pertanian dengan yang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Untuk itu dilakukan analisis data dengan uji t (data selengkapnya lihat Lampiran 8).

Grafik 4.4 Daerah penerimaan Uji Beda Dua Rata-rata menurut PAD



Hasil uji statistik t terhadap data Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan bahwa t_{hitung} adalah sebesar -2,618. Nilai t_{tabel} untuk $n = 30$ pada $\alpha/2 = 0,025$ adalah sebesar 2,018. Karena $-2,618 < -2,018$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka, bila dilihat dari sisi PAD, terdapat beda yang signifikan antara derajat desentralisasi fiskal daerah yang dominan sektor pertanian dengan daerah yang dominan sektor industri dan pengolahan.

Grafik 4.5 Daerah penerimaan uji beda rata-rata menurut Dana Perimbangan



Hasil uji statistik t terhadap data variabel Dana Perimbangan (G) menunjukkan bahwa t_{hitung} adalah sebesar 2,546. Nilai t_{tabel} untuk $n = 30$ pada taraf $\alpha/2 = 0,025$ adalah sebesar 2,018. Karena $2,546 > +2,018$, maka H_0 ditolak

kabupa Bila dilihat dari hasil analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/Kota yang berbasis pertanian memiliki rata-rata DDF relatif kecil, yaitu sebesar 4,56 % sedangkan proporsi dana perimbangan terhadap total penerimaan APBD memiliki rata-rata sebesar 93,27 %. Dari hasil analisis tersebut untuk daerah yang berbasis pertanian memiliki pangsa PAD yang cukup kecil terhadap total penerimaan APBD daerah bersangkutan sehingga memerlukan dana alokasi pembangunan yang relatif cukup besar sebagai penyeimbang anggaran belanja daerahnya, hal ini terlihat dari pangsa PAD terhadap penerimaan daerah yang cenderung kecil, dengan nilai yang paling rendah di kabupaten Sampang sebesar 2,67 % dan nilai yang paling tinggi di kabupaten Jombang sebesar 8,31 %. Bila dilihat dari segi pangsa dana perimbangan proporsi tertinggi adalah di kabupaten Sumenep yaitu sebesar 95,28 % sedangkan proporsi dana perimbangan yang paling rendah ada di kabupaten Lumajang sebesar 89,50 %.

Dengan melihat daerah yang berbasis sektor pertanian maka sektor pertanian hanya berkembang di daerah pinggiran atau bukan berada di daerah pusat pertumbuhan. Hal ini disebabkan lahan kosong di daerah yang kurang maju/pedesaan masih melimpah selain itu tenaga kerja di bidang pertanian mudah diperoleh.

Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan nasional di negara yang sedang berkembang adalah kuatnya paradigma sentralistik dalam pengambilan kebijaksanaan ekonomi dan juga penguasaan aset-aset ekonomi. Hal ini menyebabkan timbulnya *backwash effect* (efek pencucian) dimana daerah yang lebih maju (daerah industri) akan menguras sumber daya yang tersedia di daerah yang kurang maju (daerah pertanian), Gunnar Myrdal (dalam Sukirno : 1985) menyebut fenomena ini sebagai kausi kumulatif yang akan memperbesar keenjangan daerah kaya dengan daerah miskin.

Ini ditunjukkan dengan rendahnya proporsi rata-rata proporsi PAD daerah pertanian yaitu sebesar 4,56 % dibandingkan dengan proporsi PAD daerah yang berbasis industri yaitu sebesar 13,61 %. Sedang daerah pertanian yang paling mencolok nilai DDF-nya adalah daerah yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang basis ekonominya pertanianyaitu terdapat di

kabupaten Jombang yang memiliki proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD sebesar 8,31 % dan kabupaten Jember yang memiliki proporsi PAD sebesar 6,19 %. Kedua Kabupaten tersebut yaitu Jombang dan Jember bahkan mampu melebihi kabupaten Tulungagung yang basis perekonomiannya sektor industri yaitu mempunyai proporsi PAD sebesar 4,28 %. Ini menunjukkan sektor pertanian mampu berkembang dan bersaing dengan 8 sektor yang lain, dikarenakan hasil pertanian di kabupaten Jombang dan Jember memiliki nilai yang produktif artinya hasil pertanian tersebut di jadikan sebagai bahan input suatu industri, misalnya kabupaten Jombang hasil pertaniannya berupa tanaman tebu yang digunakan sebagai bahan industri gula. Sedangkan kabupaten Jember memiliki hasil pertanian berupa tanaman tembakau yang digunakan sebagai input industri rokok.

Untuk mencegah *backwash effect* maka pembangunan di setiap daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan perencanaan wilayah yang baik dan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar, selain itu perlu di upayakan industrialisasi di sektor pertanian melalui agroindustri termasuk salah satu usaha yang sering dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah yang berbasis ekonomi pertanian sehingga akan mendorong sektor-sektor lain yaitu adanya keterkaitan dari sektor hulu, sektor antara, dan industri hilir.

Usaha lainnya dapat ditempuh dengan pembangunan industrialisasi secara besar-besaran yaitu mendirikan industri manufaktur sebagai *leading sector* yang akan menimbulkan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), maka dengan desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota yang berbasis ekonomi pertanian (daerah pertanian) akan memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru (*growth poles*) yang bisa memacu dan memicu pertumbuhan perekonomian di wilayah propinsi Jawa Timur.

Menurut Kuncoro (1995 : 4) lima penyebab ketergantungan fiskal adalah :

1. Kurang berperannya perusahaan daerah (BUMD) sebagai sumber penerimaan daerah.
2. Tingginya sentralisasi fiskal di bidang perpajakan, karena semua pajak utama yang paling produktif (pajak langsung dan tak langsung) ditarik oleh pusat.

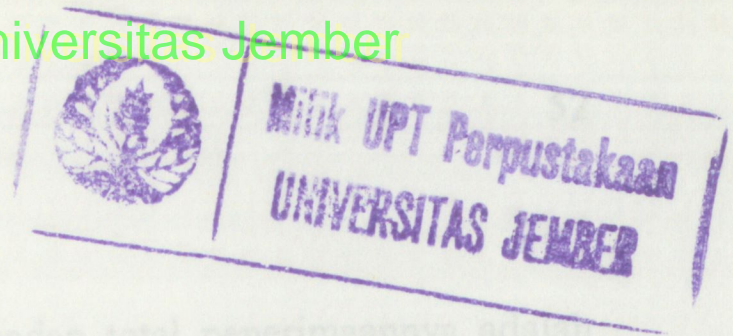
dan barang antara. Adanya hubungandan keterkaitan antar sektor inilah yang nantinya akan menggerakkan roda perekonomian dalam suatu wilayah secara keseluruhan.

Untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang berada di dua urutan teratas dalam proporsi sumbangan PAD-nya yaitu sebesar 27,47 % untuk Kota Surabaya dan 19,45 % untuk Kabupaten Sidoarjo. Kedua daerah itu memiliki banyak sekali industri-industri yang menjadi *leading sector*, misalnya perusahaan Maspion yang memproduksi berbagai macam barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga, industri konveksi juga sangat melimpah, industri sepatu Pro ATT yang mempunyai anak perusahaan sampai di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Untuk Kabupaten Gresik dengan proporsi PAD di urutan ketiga yaitu sebesar 12,34 % memiliki industri yang sudah tidak asing lagi untuk dikenal yaitu industri Semen Gresik yang sudah menguasai di seluruh pasar di Indonesia. Di Kabupaten Pasuruan dengan penyumbang PAD sebesar 9,21 % terdapat suatu kawasan industri PIER, di daerah tersebut merupakan kawasan berikat yang terdapat sekumpulan industri-industri yang saling mendukung anantara industri satu dengan industri yang lainnya, jadi daerah tersebut dikhususkan sebagai tempat pendirian perusahaan-perusahaan.

Untuk Kota Kediri dengan proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD sebesar 8,90 % dan Kabupaten Tulungagung dengan penyumbang PAD sebesar 4,28 % terhadap total penerimaan APBD-nya. Kedua daerah tersebut kurang menonjol dalam Derajat Desentralisasi Fiskalnya karena kedua daerah tersebut kurang maju akibat terbatasnya fasilitas maupun sarana dan prasarana untuk mendorong industri-industri di daerah yang bersangkutan, misalnya sektor angkutan dan transportasi yang kurang baik atau mungkin dapat juga disebabkan jauhnya dari daerah penyedia bahan baku maupun letak geografis yang kurang strategis untuk daerah pemasarannya sehingga distribusi dari produk itu kurang baik.

Dari hasil analisis diatas terdapat perbedaan yang signifikan mengenai ketergantungan fiskal antara daerah pertanian dengan daerah industri, baik dilihat



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap perbandingan antara derajat desentralisasi fiskal antara kabupaten/kota yang berbasis sektor pertanian dengan kabupaten / kota yang berbasis sektor industri pengolahan di Propinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konfigurasi Propinsi Jawa Timur berdasar sumbangan sektoral terhadap PDRB kabupaten/kota tahun 2001. Yang termasuk daerah berbasis pertanian adalah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Yang termasuk daerah berbasis sektor industri dan pengolahan adalah Tulungagung, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Kota Kediri, Kota Surabaya.

Sedangkan daerah yang memiliki basis perekonomian di sektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah Mojokerto, Tuban, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Malang.

Dan untuk seluruh kabupaten / kota di propinsi Jawa Timur hanya ada satu daerah yang memiliki basis perekonomian angkutan dan komunikasi yaitu Kota Probolinggo.

2. Secara nyata seluruh kabupaten/kota dalam wilayah administratif propinsi Jawa Timur memiliki ketergantungan fiskal terhadap pusat yang relatif masih cukup tinggi, namun kabupaten/kota yang didominasi sektor industri memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki basis perekonomiannya sektor pertanian. Dilihat dari perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) antara daerah yang berbasis ekonomi pertanian dengan daerah yang berbasis ekonomi industri, ternyata daerah pertanian memiliki ketergantungan fiskal yang cukup

DAFTAR PUSTAKA

- _____. UU No. 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- _____. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- _____. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- _____. Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005
- Adisubrata, Winarna Surya, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta ; UPP AMP YKPN
- Arsyad, Lincoln, 1993, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta ; UPP AMP YKPN
- Dajan, Anto, 1986, *Pengantar Metode Statistik I*, Jakarta ; LP3ES
- Dajan, Anto, 1986, *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta ; LP3ES
- Kuncoro, Mudradjat, 1997, *Ekonomi Pembangunan ; Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : Widyasarana Informatika
- Kusumadewi, Rina, 2001, *Analisis Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Pemerintah di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah*, Skripsi tidak dipublikasikan, Semarang ; FE Universitas Diponegoro
- Nazir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Radianto, Elia, 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II*, Maluku; Prisma UP-FE
- Rasyid, Ryaas, 1998, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta ; Yarsif Watampone
- Santoso, Singgih, 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan ; Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI
- Sudjana, 1996, *Metoda Statistika*, Bandung : Tarsito
- Supranto, J, 1989, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta ; Erlangga
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar

PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 (dalam jutaan rupiah)

No.	Kab./Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	Pacitan	175.467,13	13.647,38	2.701,73	1.495,09	27.061,58	43.764,89	21.002,98	29.071,90	86.994,22	401.206,90
2	Ponorogo	279.604,50	59.176,11	11.651,73	5.899,44	40.530,16	96.837,40	34.137,71	40.183,16	136.027,59	704.047,80
3	Trenggalek	140.397,46	12.617,87	3.166,56	3.305,78	22.034,31	61.578,50	18.598,76	35.822,59	124.032,98	421.554,81
4	<i>Tulungagung</i>	197.131,09	68.136,92	306.825,87	20.429,49	41.874,73	297.013,12	92.104,53	56.531,13	179.786,12	1.259.833,00
5	Blitar	344.826,12	61.776,88	6.518,93	4.819,65	38.277,00	98.154,62	28.870,21	58.119,12	185.821,64	827.184,17
6	Kediri	486.961,04	66.381,09	194.828,27	5.588,50	37.313,26	298.688,69	66.042,66	72.426,02	235.005,60	1.463.235,13
7	Malang	734.188,52	24.076,09	207.906,88	60.126,84	142.664,43	532.125,77	260.837,00	159.697,46	387.824,07	2.509.447,06
8	Lumajang	384.260,36	18.549,70	56.979,69	8.508,49	26.946,10	191.694,48	53.398,65	57.359,93	163.630,07	961.327,47
9	Jember	667.343,19	27.901,42	93.788,36	17.166,12	87.606,00	418.395,66	191.502,70	140.778,02	308.594,38	1.953.075,85
10	Banyuwangi	579.095,70	50.711,60	140.907,54	21.002,58	59.084,64	330.586,38	245.438,19	111.960,40	260.271,40	1.799.058,43
11	Bondowoso	262.305,85	530,53	16.386,48	4.858,83	17.610,15	101.171,25	34.907,00	43.270,20	147.635,19	628.675,48
12	Situbondo	294.961,95	8.824,30	40.584,33	10.425,98	22.806,77	159.689,29	49.905,03	41.864,81	117.208,68	746.271,14
13	Probolinggo	554.359,76	830,96	136.422,70	18.296,81	85.299,35	201.093,46	44.712,32	59.545,98	140.901,02	1.241.462,36
14	<i>Pasuruan</i>	507.642,54	64.603,49	987.187,80	36.196,32	94.001,41	569.762,92	62.657,37	105.263,29	208.813,62	2.636.128,76
15	<i>Sidoarjo</i>	215.238,43	1.997,31	2.201.662,70	279.399,75	192.090,10	1.192.704,09	379.200,14	203.501,51	246.942,38	4.912.736,41
16	Mojokerto	222.429,64	73.852,81	203.325,51	30.964,72	93.656,41	254.718,77	62.081,93	60.325,41	144.114,35	1.145.469,56
17	Jombang	327.980,24	2.223,08	76.278,52	15.251,00	33.104,71	188.036,11	97.875,31	60.720,94	216.124,67	1.017.594,58
18	Nganjuk	273.994,27	1.075,18	26.701,98	11.970,61	34.261,48	171.372,24	51.560,24	49.402,67	170.649,63	790.988,30
19	Madiun	225.248,79	344,46	12.307,96	5.086,96	13.426,30	93.255,35	24.321,02	39.437,01	120.707,73	534.135,58
20	Magetan	274.442,20	215,83	14.352,39	6.362,26	14.411,27	107.532,00	37.363,38	32.497,12	129.100,43	616.276,88
21	Ngawi	311.099,89	4.352,43	14.481,60	5.740,45	17.238,35	111.315,39	36.977,46	46.311,22	145.638,72	693.155,64
22	Bojonegoro	447.447,35	1.805,79	30.806,15	7.711,21	20.071,94	117.919,67	55.110,15	60.636,71	161.062,67	902.571,64

23	Tuban	20,01	18,59	16,98	0,55	5,50	21,09	3,33	3,65	10,28	100,00
24	Lamongan	50,43	0,91	0,57	1,02	3,44	15,23	3,93	5,05	19,42	100,00
25	<i>Gresik</i>	10,11	6,20	47,76	2,78	3,14	16,46	4,45	4,31	4,79	100,00
26	Bangkalan	44,29	0,13	0,60	1,14	3,42	21,92	6,34	5,67	16,49	100,00
27	Sampang	54,22	0,07	0,64	0,54	2,22	20,17	2,69	4,91	14,53	100,00
28	Pamekasan	33,29	1,05	0,34	1,27	3,13	23,14	5,67	7,40	24,70	100,00
29	Sumenep	41,15	3,65	5,60	0,56	2,11	18,29	3,93	7,01	17,71	100,00
30	<i>Kota Kediri</i>	0,28	0,01	78,07	0,74	0,47	11,63	2,79	4,62	1,39	100,00
31	Kota Blitar	4,53	0,05	10,59	2,91	5,87	34,18	19,26	6,70	15,91	100,00
32	Kota Malang	0,76	0,05	30,51	2,91	5,88	31,57	12,36	6,27	9,69	100,00
33	Kota Probolinggo	3,86	0,07	21,91	4,27	4,20	25,29	25,75	6,07	8,58	100,00
34	Kota Pasuruan	5,30	0,22	13,47	11,56	4,89	32,72	15,02	5,26	11,55	100,00
35	Kota Mojokerto	1,96	0,00	7,05	24,09	3,88	26,83	19,15	4,79	12,26	100,00
36	Kota Madiun	1,76	0,02	18,57	2,58	3,67	35,82	14,01	7,46	16,11	100,00
37	<i>Kota Surabaya</i>	0,26	0,01	30,66	4,83	7,09	29,21	13,33	7,08	7,53	100,00

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur (2002)

**SUMBER PENERIMAAN DAERAH SEKTOR PERTANIAN
SE JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2001**

No.	Kab. / Kota	Bagian Sisa Lebih		PAD		Dana Perimbangan		Pinjaman		Total
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
1	Pacitan	3.609.740	1,59	8.089.122	3,57	215.053.840	94,84	0	0,00	226.752.702
2	Ponorogo	3.294.849	1,20	14.262.406	5,20	256.982.038	93,60	0	0,00	274.539.293
3	Trenggalek	7.830.813	3,11	9.696.127	3,85	234.626.222	93,05	0	0,00	252.153.162
5	Blitar	4.699.067	1,48	12.372.878	3,91	299.659.782	94,61	0	0,00	316.731.727
6	Kediri	8.310.772	2,41	17.532.079	5,09	318.904.050	92,50	0	0,00	344.746.901
7	Malang	611.510	0,12	26.701.087	5,39	468.092.851	94,49	0	0,00	495.405.448
8	Lumajang	14.008.217	4,92	15.875.622	5,58	254.721.991	89,50	0	0,00	284.605.830
9	Jember	8.423.659	1,75	29.735.200	6,19	442.345.043	92,06	0	0,00	480.503.902
10	Banyuwangi	4.599.593	1,35	18.043.905	5,28	319.165.946	93,38	0	0,00	341.809.444
11	Bondowoso	4.783.928	1,67	9.887.619	3,46	271.223.469	94,87	0	0,00	285.895.016
12	Situbondo	5.818.151	2,44	11.579.760	4,86	220.725.974	92,69	0	0,00	238.123.885
13	Probolinggo	3.900.927	1,52	8.805.949	3,42	244.458.439	95,06	0	0,00	257.165.315
17	Jombang	4.545.795	1,58	23.940.450	8,31	259.550.326	90,11	0	0,00	288.036.571
18	Nganjuk	5.305.739	1,90	14.251.799	5,12	259.046.080	92,98	0	0,00	278.603.618
19	Madiun	1.641.601	0,77	6.515.604	3,05	199.307.861	93,17	6.450.000	3,02	213.915.066
20	Magetan	3.907.925	1,49	12.741.741	4,85	245.819.552	93,66	0	0,00	262.469.218
21	Ngawi	11.520.574	4,69	9.540.182	3,89	224.493.113	91,42	0	0,00	245.553.869
22	Bojonegoro	8.967.154	3,31	12.866.225	4,74	249.392.395	91,95	0	0,00	271.225.774
24	Lamongan	6.111.848	2,12	16.525.797	5,72	266.303.916	92,17	0	0,00	288.941.561
26	Bangkalán	3.583.024	1,68	7.976.420	3,73	202.008.513	94,59	0	0,00	213.567.957
27	Sampang	5.549.595	2,71	5.465.320	2,67	193.834.571	94,62	0	0,00	204.849.486
28	Pamekasan	4.649.801	2,03	7.960.039	3,47	216.926.429	94,51	0	0,00	229.536.269
29	Sumenep	5.544.262	1,22	15.956.631	3,50	434.014.116	95,28	0	0,00	455.515.009
	Jumlah	131.218.544,00	47,05	316.321.962,00	104,83	6.296.656.517,00	2.145,10	6.450.000,00	3,02	6.750.647.023,00
	Rata-rata	5.705.154,09	2,05	13.753.128,78	4,56	273.767.674,65	93,27	280.434,78	0,13	293.506.392,30

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur (2002)

Lampiran 6

PAD

Uji Normalitas Data

Case Processing Summary

X	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PAD Pertanian	23	100,0%	0	,0%	23	100,0%
Industri	6	100,0%	0	,0%	6	100,0%

Descriptives

X	Statistic	Std. Error	
PAD Pertanian	Mean	,26391	
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	4,0114	
	Upper Bound	5,1060	
	5% Trimmed Mean	4,4678	
	Median	4,7400	
	Variance	1,602	
	Std. Deviation	1,26565	
	Minimum	2,67	
	Maximum	8,31	
	Range	5,64	
	Interquartile Range	1,7800	
	Skewness	1,067	,481
	Kurtosis	2,011	,935
Industri	Mean	3,44679	
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	4,7481	
	Upper Bound	22,4686	
	5% Trimmed Mean	13,3565	
	Median	10,7750	
	Variance	71,282	
	Std. Deviation	8,44288	
	Minimum	4,28	
	Maximum	27,47	
	Range	23,19	
	Interquartile Range	13,7100	
	Skewness	,927	,845
	Kurtosis	,159	1,741

Normal Q-Q Plots

Tests of Normality

X	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PAD Pertanian	,174	23	,069	,912	23	,046
Industri	,226	6	,200*	,924	6	,535

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
PAD Based on Mean	36,287	1	27	,000
Based on Median	17,798	1	27	,000
Based on Median and with adjusted df	17,798	1	5,742	,006
Based on trimmed mean	33,044	1	27	,000

PAD

Stem-and-Leaf Plots

PAD Stem-and-Leaf Plot for X= Pertanian

Frequency	Stem & Leaf
1,00	2 . 6
10,00	3 . 0444557889
3,00	4 . 788
7,00	5 . 0122357
1,00	6 . 1
1,00	Extremes (>=8,3)

Stem width: 1,00
Each leaf: 1 case(s)

PAD Stem-and-Leaf Plot for X= Industri

Frequency	Stem & Leaf
3,00	0 . 489
2,00	1 . 29
1,00	2 . 7

Stem width: 10,00
Each leaf: 1 case(s)

Lampiran 7
 Dana Perimbangan
 Uji Normalitas Data

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dana Perimbangan	Pertanian	23	100,0%	0	,0%	23	100,0%
	Industri	6	100,0%	0	,0%	6	100,0%

Descriptives

X		Statistic	Std. Error		
Dana Perimbangan	Pertanian	Mean	93,2657	,32679	
		95% Confidence Interval for Mean	92,5879		
		Lower Bound	93,9434		
		Upper Bound	93,3601		
		5% Trimmed Mean	93,3800		
		Median	2,456		
		Variance	1,56724		
		Std. Deviation	89,50		
		Minimum	95,28		
		Maximum	5,78		
		Range	2,4400		
		Interquartile Range	-,828		,481
		Skewness	,235		,935
		Kurtosis			
Industri	Industri	Mean	82,8767	4,06676	
		95% Confidence Interval for Mean	72,4227		
		Lower Bound	93,3306		
		Upper Bound	83,0919		
		5% Trimmed Mean	85,3800		
		Median	99,231		
		Variance	9,96149		
		Std. Deviation	67,31		
		Minimum	94,57		
		Maximum	27,26		
		Range	16,6400		
		Interquartile Range	-,653		,845
		Skewness	-,407		1,741
		Kurtosis			

Normal Q-Q Plots

Tests of Normality

X	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Perimbangan Pertanian	,174	23	,069	,922	23	,075
Industri	,210	6	,200*	,952	6	,758

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Dana Perimbangan Based on Mean	34,632	1	27	,000
Based on Median	27,865	1	27	,000
Based on Median and with adjusted df	27,865	1	6,123	,002
Based on trimmed mean	34,517	1	27	,000

Dana Perimbangan Stem-and-Leaf Plots

Dana Perimbangan Stem-and-Leaf Plot for X= Pertanian

Frequency	Stem & Leaf
1,00	89 . 5
1,00	90 . 1
2,00	91 . 49
5,00	92 . 01569
5,00	93 . 01366
7,00	94 . 4556688
2,00	95 . 02

Stem width: 1,00
Each leaf: 1 case(s)

Dana Perimbangan Stem-and-Leaf Plot for X= Industri

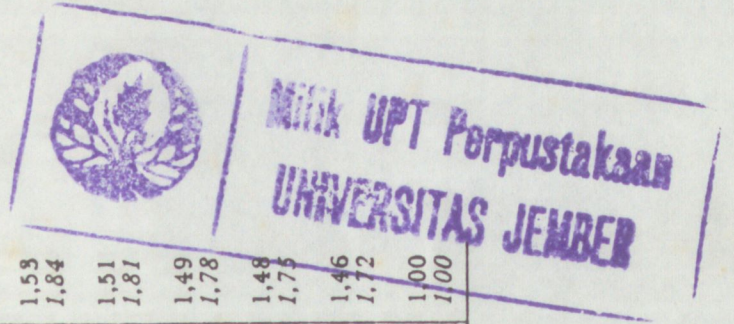
Frequency	Stem & Leaf
1,00	6 . 7
1,00	7 . 5
3,00	8 . 288
1,00	9 . 4

Stem width: 10,00
Each leaf: 1 case(s)

DAFTAR XIX(11)
 Digital Repository Universitas Jember
 NILAI KRITIS L UNTUK UJI LILLIEFORS

Ukuran Sampel	Taraf Nyata (α)				
	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20
n = 4	0,417	0,381	0,352	0,319	0,300
5	0,405	0,337	0,315	0,299	0,285
6	0,364	0,319	0,294	0,277	0,265
7	0,348	0,300	0,276	0,258	0,247
8	0,331	0,285	0,261	0,244	0,233
9	0,311	0,271	0,249	0,233	0,223
10	0,294	0,258	0,239	0,224	0,215
11	0,284	0,249	0,230	0,217	0,206
12	0,275	0,242	0,223	0,212	0,199
13	0,268	0,234	0,214	0,202	0,190
14	0,261	0,227	0,207	0,194	0,183
15	0,257	0,220	0,201	0,187	0,177
16	0,250	0,213	0,195	0,182	0,173
17	0,245	0,206	0,189	0,177	0,169
18	0,239	0,200	0,184	0,173	0,166
19	0,235	0,195	0,179	0,169	0,163
20	0,231	0,190	0,174	0,166	0,160
25	0,200	0,173	0,158	0,147	0,142
30	0,187	0,161	0,144	0,136	0,131
n > 30	$\frac{1,031}{\sqrt{n}}$	$\frac{0,886}{\sqrt{n}}$	$\frac{0,805}{\sqrt{n}}$	$\frac{0,768}{\sqrt{n}}$	$\frac{0,736}{\sqrt{n}}$

Sumber: Conover, W.J., Practical Nonparametric Statistics, John Wiley & Sons, Inc., 1973.



Distribusi F (lanjutan)

Derajat bebas bagi pembagi (v_2)	Derajat bebas bagi pembilang (v_1)																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞	
25	4,24 7,77	3,38 5,57	2,99 4,68	2,76 4,18	2,60 3,86	2,49 3,63	2,41 3,46	2,34 3,32	2,28 3,21	2,24 3,13	2,20 3,05	2,16 2,99	2,11 2,89	2,06 2,81	2,00 2,70	1,96 2,62	1,92 2,54	1,87 2,45	1,84 2,40	1,80 2,32	1,77 2,29	1,74 2,23	1,72 2,19	1,72 2,17	1,71 2,17
26	4,22 7,72	3,37 5,53	2,89 4,64	2,74 4,14	2,59 3,82	2,47 3,59	2,39 3,42	2,32 3,29	2,27 3,17	2,22 3,09	2,18 3,02	2,15 2,96	2,10 2,86	2,05 2,77	1,99 2,66	1,95 2,58	1,90 2,50	1,85 2,41	1,82 2,36	1,78 2,28	1,76 2,25	1,72 2,19	1,72 2,15	1,70 2,15	1,69 2,13
27	4,21 7,68	3,35 5,49	2,96 4,60	2,73 4,11	2,57 3,79	2,46 3,56	2,37 3,39	2,30 3,26	2,25 3,14	2,20 3,06	2,16 2,98	2,13 2,93	2,08 2,83	2,03 2,74	1,97 2,63	1,93 2,55	1,88 2,47	1,84 2,38	1,80 2,33	1,76 2,25	1,74 2,21	1,71 2,16	1,68 2,12	1,67 2,10	1,67 2,06
28	4,20 7,64	3,34 5,54	2,95 4,57	2,71 4,07	2,56 3,76	2,44 3,53	2,36 3,36	2,29 3,23	2,24 3,11	2,19 3,03	2,15 2,95	2,12 2,90	2,06 2,80	2,02 2,71	1,96 2,60	1,91 2,52	1,87 2,44	1,81 2,35	1,78 2,30	1,75 2,22	1,72 2,18	1,69 2,13	1,67 2,09	1,67 2,06	1,65 2,06
29	4,18 7,60	3,33 5,52	2,93 4,54	2,70 4,04	2,54 3,73	2,43 3,50	2,35 3,33	2,28 3,20	2,22 3,08	2,18 3,00	2,14 2,92	2,10 2,87	2,05 2,77	2,00 2,68	1,94 2,57	1,90 2,49	1,85 2,41	1,80 2,32	1,77 2,27	1,73 2,19	1,71 2,15	1,68 2,10	1,65 2,06	1,64 2,03	1,64 2,03
30	4,17 7,56	3,32 5,39	2,92 4,51	2,69 4,02	2,53 3,70	2,42 3,47	2,34 3,30	2,27 3,17	2,21 3,06	2,16 2,98	2,12 2,90	2,09 2,84	2,04 2,74	1,99 2,66	1,93 2,55	1,89 2,47	1,84 2,38	1,79 2,29	1,76 2,24	1,72 2,16	1,69 2,13	1,66 2,07	1,64 2,03	1,64 2,03	1,62 2,01
32	4,15 7,50	3,30 5,34	2,90 4,46	2,67 3,97	2,51 3,66	2,40 3,42	2,32 3,25	2,25 3,12	2,19 3,01	2,14 2,94	2,10 2,86	2,07 2,80	2,02 2,70	1,97 2,62	1,91 2,51	1,86 2,42	1,82 2,34	1,76 2,25	1,74 2,20	1,69 2,12	1,67 2,08	1,64 2,02	1,61 1,98	1,61 1,98	1,59 1,96
34	4,13 7,44	3,28 5,29	2,88 4,42	2,65 3,93	2,49 3,61	2,38 3,38	2,30 3,21	2,23 3,08	2,17 2,97	2,12 2,89	2,08 2,82	2,05 2,76	2,00 2,66	1,95 2,58	1,89 2,47	1,84 2,38	1,80 2,30	1,74 2,21	1,71 2,15	1,67 2,08	1,65 2,04	1,62 2,00	1,59 1,94	1,59 1,94	1,57 1,91
36	4,11 7,39	3,26 5,25	2,86 4,38	2,63 3,89	2,48 3,58	2,36 3,35	2,28 3,18	2,21 3,04	2,15 2,94	2,10 2,86	2,06 2,78	2,03 2,72	1,89 2,62	1,93 2,54	1,87 2,43	1,82 2,35	1,78 2,26	1,72 2,17	1,69 2,12	1,65 2,04	1,62 2,00	1,59 1,94	1,56 1,90	1,56 1,90	1,55 1,87
38	4,10 7,35	3,25 5,21	2,85 4,34	2,62 3,86	2,46 3,54	2,35 3,32	2,26 3,15	2,19 3,02	2,14 2,91	2,09 2,82	2,05 2,75	2,02 2,69	1,96 2,59	1,92 2,51	1,85 2,40	1,80 2,32	1,76 2,22	1,71 2,14	1,67 2,08	1,63 2,00	1,60 1,97	1,57 1,90	1,54 1,86	1,54 1,86	1,53 1,84
40	4,08 7,31	3,23 5,18	2,84 4,31	2,61 3,83	2,45 3,51	2,34 3,29	2,25 3,12	2,18 2,59	2,12 2,88	2,07 2,80	2,04 2,73	2,00 2,66	1,95 2,56	1,90 2,49	1,84 2,37	1,79 2,29	1,74 2,20	1,69 2,11	1,66 2,05	1,61 1,97	1,59 1,94	1,55 1,88	1,53 1,84	1,53 1,84	1,51 1,81
42	4,07 7,27	3,22 5,15	2,82 4,29	2,59 3,80	2,44 3,49	2,32 3,26	2,24 3,10	2,17 2,96	2,11 2,86	2,06 2,77	2,02 2,70	1,99 2,64	1,94 2,54	1,89 2,46	1,82 2,35	1,78 2,20	1,73 2,17	1,68 2,08	1,64 2,02	1,60 1,94	1,57 1,91	1,54 1,85	1,51 1,80	1,51 1,80	1,49 1,78
44	4,06 7,24	3,21 5,12	2,82 4,26	2,58 3,78	2,43 3,46	2,31 3,24	2,23 3,07	2,16 2,94	2,10 2,84	2,05 2,75	2,01 2,68	1,98 2,62	1,92 2,52	1,88 2,44	1,81 2,32	1,76 2,24	1,72 2,15	1,66 2,06	1,63 2,00	1,58 1,92	1,55 1,86	1,52 1,82	1,50 1,78	1,48 1,75	1,48 1,75
46	4,05 7,21	3,20 5,10	2,81 4,24	2,57 3,76	2,42 3,44	2,30 3,22	2,22 3,05	2,14 2,92	2,09 2,82	2,04 2,73	2,00 2,66	1,97 2,60	1,91 2,50	1,87 2,42	1,80 2,30	1,75 2,22	1,71 2,13	1,65 2,04	1,62 1,98	1,57 1,90	1,54 1,86	1,51 1,80	1,48 1,76	1,46 1,72	1,46 1,72
∞	3,84 6,64	2,99 4,60	2,60 3,78	2,37 3,32	2,21 3,02	2,09 2,80	2,01 2,64	1,94 2,51	1,88 2,41	1,83 2,32	1,79 2,24	1,75 2,18	1,69 2,07	1,64 1,99	1,57 1,87	1,52 1,79	1,46 1,69	1,40 1,59	1,35 1,52	1,28 1,41	1,24 1,36	1,17 1,25	1,11 1,15	1,11 1,00	1,11 1,00

Sumber: George W. Snedecor: *Statistical Methods*, 5 th edition, 1956. Penerbit: Iowa State University Press.